

ABSTRAK

Pengurusan Piutang Negara merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengertian Piutang Negara menurut PMK No. 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau alasan apapun, kepada negara atau badan yang dikuasai langsung oleh negara. Proses pelaksanaan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan Piutang Negara, seperti melakukan penerimaan dan/atau penolakan, melakukan panggilan, menerbitkan PJPn dan Surat Paksa, serta dapat melakukan lelang terhadap barang yang dijadikan jaminan. Namun, Pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Malang terkadang menemui hambatan seperti debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya. Hal ini yang membuat KPKNL Malang harus melaksanakan eksekusi baik dengan barang jaminan dan/atau kekayaan lain yang dimiliki oleh debitur maupun tidak. Menurut Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Malang, terdapat sekitar 1.200 BKPN yang diterima oleh KPKNL Malang pada tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan untuk dapat meminimalkan hambatan yang muncul, sehingga Pengurusan Piutang Negara di KPKNL Malang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

ABSTRACT

Management of State Receivables is one component of Non-Tax State Revenue (PNBP). Definition of State Receivables according to PMK No. 240/PMK.06/2016 Concerning the Management of State Receivables, namely the amount of money that must be paid based on a regulation, agreement or any reason, to the state or an agency controlled directly by the state. The implementation process that can be carried out to settle State Receivables, such as accepting and/or rejecting, making calls, issuing PJPn and Forced Letters, and being able to conduct auctions of goods that are used as collateral. However, the management of state receivables carried out by the Malang KPKNL sometimes encounters obstacles such as debtors who cannot pay off their debts. This is what makes KPKNL Malang have to carry out executions either with collateral and/or other assets owned by the debtor or not. According to the Head of the State Receivables Section of KPKNL Malang, there were around 1,200 BKPN accepted by KPKNL Malang in 2020. Therefore, improvement efforts are needed to minimize the obstacles that arise, so that the Management of State Receivables at KPKNL Malang can run effectively and efficiently.